

**HUBUNGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SURVEY PADA 9 KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT)**

Silviana

Silviana_Unbara@yahoo.co.id
Akuntansi, Universitas Widyatama Bandung

Abstrak

Sejak tahun 2003 telah dilakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, namun kenyataannya masih ada laporan keuangan pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kerangka Konseptual Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005/71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksplanatori. Unit analisis di sembilan (9) kota di Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada Auditor Intern Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Uji hipotesis menggunakan analisis korelasi.

Hasil penelitian menunjukkan, nilai koefisien korelasi sebesar 0.686, dan nilai koefisien determinasi sebesar 47.10%. Belum maksimalnya kontribusi sistem informasi akuntansi dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya disebabkan oleh: masih ada entitas yang terlambat menyerahkan laporan keuangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan masih ada yang belum memadai; sistem informasi akuntansi dan pelaporan masih ada yang belum didukung Sumber Daya Manusia yang memadai, sehingga disarankan agar pemerintah daerah khususnya pemerintah kota untuk dapat lebih meningkatkan lagi hal-hal yang masih belum memadai tersebut.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan *Good Government Governance* (GGG), diantaranya sejak tahun 2003 telah dikeluarkan paket Undang-Undang (UU) pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. (Anwar, 2009).

Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang diamanatkan dalam ketiga UU pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan yang mengandung prinsip GGG terutama transparansi dan akuntabel.

Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses

yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Selamet, 2011).

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Departemen dalam negeri telah menyediakan sistem informasi akuntansi secara cuma-cuma untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, namun kenyataannya masih ada kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah (pemda), hal ini terlihat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 ditemukan sebanyak 1.401 kasus kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan, diantaranya disebabkan oleh pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; proses penyusunan tidak sesuai ketentuan; entitas terlambat menyerahkan laporan; sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber Daya Manusia yang memadai. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi masih belum optimal pelaksanaannya.

Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2011 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa Barat menunjukkan saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan, hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diantaranya masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP). Pada tahun 2010, menunjukkan fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang salah satunya ditunjukkan dengan mendapat opini WTP baru mencapai 8,33%, opini WDP 83,33% dan opini TMP 8,33%.

Penyajian laporan keuangan yang belum *realtime* (masih bersifat tahunan/output diakhir tahun) dan bersifat angka-angka historis, mengakibatkan laporan keuangan belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan manajemen pemerintahan sehari-hari. Laporan keuangan (terutama yang WTP) belum digunakan sebagai persyaratan dalam pengambilan kebijakan menyangkut alokasi pendanaan ke daerah.

Tujuan laporan sektor publik lebih rumit dibandingkan sektor swasta, karena menyangkut aspek ekonomi, serta aspek sosial dan politik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan cenderung hanya bisa menyajikan aspek ekonomi

(melalui jenis belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi) sedangkan aspek sosial dan politik tentunya sulit untuk disajikan dalam laporan keuangan. Sulit untuk menilai atau mengukur dari laporan keuangan apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada rakyatnya.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD kota di Jawa Barat menunjukkan salah satu penyebab laporan keuangan belum berkualitas adalah masih lemahnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

SIA merupakan sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. (Bodnar & Hopwood, 2007). Barry (2003) menambahkan modal dalam organisasi, sedangkan Romney & Paul (2004) menyatakan sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi informasi.

SIA Pemerintah Daerah

Pada sistem akuntansi pemerintah, ada beberapa ciri terpenting atau persyaratan yang diperlukan, diantaranya: sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. (Sonny Loho & Sugiyanto, 2004),

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. (PP 65 / 2010)

Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

SIKD yang diterapkan di pemda sesudah periode 2005 berbasis desentralisasi, pengguna SIKD adalah Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah. Fakta empiris menggambarkan kewenangan formal dimiliki oleh Kepala (Syafurudin, 2006).

Tujuan penyelenggaraan SIKD, diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional. (PP 65/ 2010)

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam PP 58 / 2005 dan Pemandagri 13 / 2006 Pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005/PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi.

Informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Efektivitas SIA dapat memberikan informasi yang diterima manajemen untuk membantu keputusan yang bersangkutan. Efektivitas SIA dapat dievaluasi sebagai manfaat nilai tambah. Efektivitas SIA adalah ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan SIA dapat diartikan penerapannya menguntungkan, menjadi perhatian utama organisasi, memberikan kepuasan bagi banyak pengguna dan meningkatkan kualitas kinerja mereka. (Moscove et. al, 2009).

Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, output, penyimpanan data, prosesor, pengguna, dan tindakan pengendalian. Data dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi. Data berarti dan berguna, karenanya, harus diproses dan diubah ke bentuk yang bermakna, terorganisir, dan berguna yang disebut informasi. Output adalah informasi yang berarti dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi.

Gelinas (2000) menganggap efektivitas SIA sebagai ukuran keberhasilan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan SIA dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi organisasi, secara luas digunakan oleh satu atau lebih pengguna, dan meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Beberapa penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Diana (2005), menemukan kendala-kendala yang dihadapi Pemda dalam rangka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dari yang berbasis kas menjadi kas modifikasi akrual, diantaranya: lemahnya sumberdaya manusia yang memahami akuntansi di bagian keuangan, memerlukan durasi waktu yang lama (masa transisi) setiap kali ada perubahan sistem dari sistem lama ke sistem baru, lambannya penyusunan Peraturan daerah sehubungan dengan perubahan sistem, pemilihan alternatif model sistem akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berbasis *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS)* yang menggunakan basis akrual dengan sistem akuntansi dari pemerintah yang menggunakan basis kas dimodifikasi.

Mahdavi dan Funnel (2003) melakukan penelitian mengenai implementasi SIA pada Republik Islamik Iran. Hasil penelitian menunjukkan walaupun SIA sangat diperlukan di Pemerintahan Iran, namun masih terdapat kendala dalam penerapan SIA. Di Iran, masih menggunakan *cash basis*, sehingga masih membutuhkan perubahan sistem, diterbitkannya

teknik dan prosedur akuntansi pemerintahan belum memadai untuk mencapai program keuangan pemerintah. Untuk menerapkan konsep akuntabilitas, diperlukan perubahan akuntansi akrual di sektor pemerintahan.

Penelitian Mahdi et. al, (2010), menunjukkan (1) *software* informasi akuntansi belum mampu *improve* standar akuntansi di Iran, (2) *software* informasi akuntansi belum berkaitan dengan sistem keuangan dan sistem manajerial, (3) SIA belum mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan perusahaan, (4) SIA belum mampu memberikan informasi untuk semua level manajemen. SIA di masa lalu fokus pada pencatatan, peringkasan, validasi data transaksi keuangan organisasi.

Abdul (2009). Meneliti pengaruh implementasi sistem akuntansi, terhadap fungsi pengawasan. Hasil penelitian implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap fungsi audit intern sebesar 0,937%. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemda dapat dilakukan dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas, sehingga pengawasan akuntansi dapat dilakukan dengan baik.

Nunuy (2009), meneliti kompetensi aparatur pemda terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi di pemda. Implementasi akuntansi menggunakan dimensi sumber daya (personalia/pelaksana, peralatan, dan aturan); tugas; dan tujuan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi.

Mahmoud (2009), meneliti bagaimana efektivitas SIA berdampak pada kinerja organisasi. Pembelajaran organisasi dan dukungan organisasi berpengaruh terhadap efektivitas SIA.

Pornpandejwittaya (2012), meneliti efektivitas SIA mengacu pada mengumpulkan, input, memproses data, menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan informasi laporan akuntansi sehingga organisasi dapat mencapai kualitas laporan keuangan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. (Masmudi, 2003)

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara/daerah selama suatu periode. Pernyataan dalam laporan keuangan daerah dapat bersifat implisit dan eksplisit mengenai: keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan dan ketaatan dan kepatuhan.

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik ada dua yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pemakai. Tujuan khusus untuk mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai persetujuan DPR/D; menyediakan informasi alokasi sumber daya, pembiayaan, komitmen dan kewajiban, kondisi keuangan dan perubahan organisasi sektor publik, informasi untuk dievaluasi performansi organisasi sektor publik. *Public Sector Committee – International Federation Accounting Committee* (2010).

Pengguna Laporan Keuangan, menurut Drebin et. al (2005); IFAC-PSC (2010), diantaranya manajemen, badan pengawas/ pemeriksa, pegawai, pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, pemasok, pemilih, konstituen/legislatif dan Analis ekonomi dan keuangan.

Pemerintah memanfaatkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan keputusan dalam penyempurnaan kebijakan; Strategi pengembangan daerah; Perencanaan dan penganggaran daerah. Para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial-politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah.

Komponen Laporan Keuangan

Di dalam PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan LKPD paling sedikit terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami pemakai. Pemda wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemda harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Persyaratan normatif yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual PP 24/2005 antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevansi (*relevance*), andal (*reliable*) dan dapat diperbandingkan (*comparability*).

Beberapa penelitian tentang kualitas laporan keuangan diantaranya

Hasil penelitian Yousef (2008), menunjukkan tujuan dasar laporan keuangan berhubungan dengan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, menekankan informasi yang berguna dengan menunjukkan realitas ekonomi dari laporan keuangan (yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas), dan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengguna.

Sri Mulyani (2009) meneliti kontribusi kualitas laporan keuangan pemda terhadap pengambilan keputusan optimal kepala daerah Hasil penelitian menunjukkan kualitas laporan keuangan pemda memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pengambilan keputusan optimal kepala daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah *sensus*, karena semua populasi Kota berjumlah Sembilan (9) kota diteleliti semuanya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *explanatory research*. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, dengan demikian dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas jawaban responden. Metode analisis data menggunakan analisis Korelasional Spearman.

Operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel operasionalisasi Variabel

Penerapan SIA Bodnar (2010) Jeffrey L Whitten, 2004) W. Wilkonson (2000); PP 56/2005. Nunuy Nurafiah (2009)	1. Sumber daya personalia/ pelaksana peralatan, dan aturan hukum 2. Tugas 3. Tujuan	1. Ketersediaan sumberdaya manusia yang cakap untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi 2. Kelayakan peralatan yang digunakan untuk proses akuntansi 3. Adanya peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur sistem informasi akuntansi 4. Terlaksananya pemrosesan data yang akurat 5. Terkendalinya data 6. Terlaksananya penyediaan dan dtribusi informasi tepat waktu 7. Terpenuhinya kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengendalian operasi	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (SAP 24/2005, IPSAS (2010)	Dapat dipahami	1. menggunakan istilah yang dapat dipahami 2. disusun sistematis sesuai SAP 3. digunakan dalam pengambilan keputusan	Ordinal
	Relevan	1. manfaat umpan balik 2. manfaat prediktif (peramalan) 3. tepat waktu 4. lengkap	Ordinal
	Keterandalan	1. penyajian yang jujur 2. dapat diverifikasi 3. netralitas	Ordinal
	Dapat diperbandingkan	1. konsistensi penerapan	Ordinal

		2. kebijakan akuntansi 3. perbandingan antar waktu 4. perbandingan antar entitas	
--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, hasil pengujian atas item kuesioner menunjukkan nilai terendah 0.45 dan tertinggi 0.91, dengan demikian nilai lebih besar dari 0.3 maka dapat dikatakan valid, sedangkan untuk uji reliabilitas menunjukkan nilai 0.89, dengan demikian dapat dikatakan datanya reliabel. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai 0.686 dan dari hasil perhitungan determinasi diperoleh nilai sebesar 0.471 atau 47.10%

			x	y
Spearman's rho	x	Correlation Coefficient	1.000	.686*
		Sig. (2-tailed)	.	.041
		N	9	9
	y	Correlation Coefficient	.686*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.041	.
		N	9	9

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien korelasi dari variabel penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,686 ($\rho_{YX_2} = 0,686$). Karena nilai koefisien korelasi lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berhubungan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kota di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

Penerapan sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi sebesar 47.10% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kontribusi sebesar 47.10% menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dapat menjelaskan kualitas laporan

keuangan sebesar 47.10% sedangkan sisanya sebesar 52.90% disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Otley (1980), dimana Otley menyatakan tidak ada sistem yang secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, karena sistem akuntansi tergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi. Selaras juga dengan pendapat Barry E. Cushing (2003); Bodnar dan Hopwood (2010), yang menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Didukung juga dengan pernyataan Purnomo (2011), bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah berdasarkan sistem akuntansi yang andal dan sesuai dengan SAP. Selaras dengan penelitian Mahdavi dan Funnel, (2006), yang menyatakan sistem keuangan dan manajerial, belum mencakup semua kebutuhan informasi keuangan organisasi dan belum mencakup semua tingkat manajemen informasi.

Penyebab masih rendahnya kontribusi SIA terhadap Kualitas LKPD dalam penelitian Nunuy (2009) yang selaras dengan penelitian ini diantaranya : pemerintah daerah masih kekurangan sumber daya manusia yang cakap untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi yang berdasarkan *double entry system*, masih kekurangan peralatan yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem informasi akuntansi yang cepat dan akurat, karena keterbatasan teknologi; belum mampu memberikan informasi keuangan secara komprehensif; peraturan yang menetapkan kebijakan mengenai sistem informasi akuntansi untuk mendukung pelaporan keuangan yang andal dan akuntabel, kurang memadai; distribusi laporan keuangan dengan baik sehingga pemakai belum dapat menerima laporan keuangan pada waktu yang dibutuhkan.

Temuan penelitian

Merujuk pada temuan hasil penelitian, penerapan sistem informasi akuntansi di pemda masih sangat memerlukan perbaikan dan peningkatan. Pendapat ahli menyebutkan laporan keuangan dimulai dari input yang baik, proses yang baik dan output yang dihasilkan akan baik juga. Input yang baik didukung bahan bukti yang lengkap, benar apa adanya, dalam proses dibutuhkan peralatan yang memadai (jumlah komputer, *software*, tenaga ahli teknologi informasi, sdm berlatar belakang pendidikan akuntansi, peraturan pendukung pengelolaan

keuangan daerah), output yang dihasilkan akan akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dibandingkan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penerapan SIA berhubungan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan jawaban responden dari entitas yang diteliti, variabel penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas LKPD. Hal ini disebabkan SIA merupakan sistem yang terintegrasi dalam menghasilkan laporan keuangan, walaupun terdapat faktor-faktor yang masih kurang optimal diantaranya kompetensi sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi juga masih minim di bagian keuangan maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Minimnya jumlah lulusan akuntansi yang bekerja di pemda (bagian keuangan), karena penerimaan pegawai yang berlatar belakang akuntansi jumlahnya sangat sedikit.

SARAN

Dalam penerapan SIA, beberapa saran yang dapat diberikan, diantaranya: Pemda lebih meningkatkan lagi ketersediaan sdm yang cakap untuk melaksanakan sistem informasi akuntansi yang berdasarkan *double entry system*; lebih meningkatkan lagi penyediaan peralatan/fasilitas yang memadai untuk mendukung berjalannya sistem informasi akuntansi yang cepat dan akurat, karena keterbatasan teknologi yang terintegrasi; lebih memutakhirkan peraturan yang menetapkan kebijakan mengenai sistem informasi akuntansi untuk mendukung pelaporan keuangan yang andal dan akuntabel. Dalam Kualitas LKPD beberapa saran yang dapat diberikan, diantaranya agar LKPD dari aspek relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan lebih ditingkatkan lagi, sehingga lebih bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochman. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi pengawasan dan Kinerja Pemda. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 9 Nomor 1
- Agus D.W. Martowardojo. 2010. APIP Jamin Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sesuai SAP. <http://www.bppk.depkeu.go.id>. diunduh 12 Februari 2011
- Anwar Nasution. 2009. Kemajuan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara Periode 2004-2009. Warta BPK. Vol. 4, No. 1, Januari. www.bpk.go.id diunduh tanggal 24 November 2011
- Barry E Cushing, Romney Marthal D, 2003. Accounting Information System. John.Adison Wishley.

Proceeding Call for Papers dan Seminar Nasional
Fakultas Ekonomi UNS, 30-31 Mei 2013

- Bodnar H George William S. Hopwood. 2007. Accounting Information System.. Edisi 9. Terjemahan. Penerbit Andi.
- Budi Mulyana. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Mei
- Chaveerug, Aukkaradej. 2011. The role of accounting information system knowledge on audit effectiveness of CPAs in Thailand. *International Journal of Business Strategy. International Academy of Business and Economics. ISSN: 1553-9563.* Dec, 2011. Source Volume: 11 Source Issue: 3
- Diana Tien Irafahmi. 2005. Menuju Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Baru. *Jurnal Eksekutif.* Volume 2 nomor 2
- Drebin, A.R. Chan, J.L dan Fergusi. 2005. Objectives of Accounting and Financial reporting for governmental units. *A research study national council on governmental accounting.* Vol 1 & 2
- Feltham. G. A. 1972. Information Evaluation. Sarasota.FL: American Accounting Association
- Ferdy van Beest, Geert Braam, dan Suzanne Boelens. 2009. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE). Working Paper 09-108* April
- Griffin Julie. 2008. The Implementation of a Computerised Integrated System in a Public Service Organisation. *International Journal of Business and Management* August, 2008
- Mahdavi and Funel 2003. Public Sector Accountability and Accounting Information System in the Islamic republic Iran. *Iranian Journal of Information Science and Technology*, Volume 1 Number 2. July
- Mahdi Salehi, Mahmood Hemmatfar, Marziyeh Bayat, 2010. Competitive Advantages and Strategic Information Systems. *International Journal of Business and Management.* Vol. 5, No. 7; July
- Masmudi, 2005. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, volume 3 nomor 1.
- Moscove, SM Simkin and Bagnaroff 2009. Core concept of Accounting Information System. Newyork, NY, JohnWiley&Sons. Inc
- Pornpandejwittaya, Pairat. 2012. Effectiveness of accounting information system: effect on performance of Thai-listed firms in Thailand. *International Academy of Business and Economics* ISSN:1555-1296 Copyright: 07/01/2012..
- Razae Zabihollah . 2003. High quality financial reporting. The six logged stool. Strategic finance
- Romney B Marshall, and Paul John Steibart. 2004. Accounting Information System. Salemba Empat. Jakarta Salehi Mahdi,. V. Rastomi, Moghadam. 2010. Usefulness of Accounting Information System in Emerging Economy: Empirical Evidence of Iran. *International Journal of Economics and Finance* Vol. 2, No. 2; May
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi. 2006. Metode Penelitian Survei. Edisi ke-2. Jakarta. LP3ES
- Tuasikal, A. 2007. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148
- Uma Sekaran. 2010. Research Method for Business : A Skill Building Approach. Four Edition. New York. John Wiley & Sons Inc
- Wilkinson W. Joseph. 2000. Accounting Information System. Jilid 3. alih bahasa Agus Maulana. Binarupa Aksara Jakarta
- Yousef Shahwan, (2008) "Qualitative characteristics of financial reporting: a historical perspective", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 9 Iss: 3, pp.192 - 202